

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : JURNAL NASIONAL
Subyek :
Kata Kunci :

Tgl/Bln/Thn : 09/01/2009
Hari : Jumat
Halaman : 14

Ratusan Warga Depok Serbu Kantor Wali Kota

Ratusan warga Perumahan Taman Cipayung, Perumahan Bukit Rivaria, Perumahan Graha Cineren dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta serbu kantor wali kota terkait penolakan pembangunan unit pengolahan sampah (UPS). Mereka menuntut agar wali kota menghentikan pembangunan UPS yang hanya berjarak 500 meter dari pemukiman warga. Aksi berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB.

"Kami tidak akan berhenti berdemo sampai wali kota mencabut program tersebut," kata koordinator aksi Arif Budiman, Kamis (8/1).

Ribuan warga yang memenuhi lapangan tersebut terus menunggu kehadiran Nur Mahmudi sambil berorasi dan melakukan aksi teatrikal. Nur Mahmudi disimbolkan sebagai badut yang mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Mereka menilai selama ini Nur Mahmudi tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam teatrikal itu juga beberapa warga melakukan aksi sawer kepada badut tersebut.

Hingga akhirnya beberapa orang perwakilan dari warga masuk ke gedung balai kota dan bertemu dengan Asisten Wali Kota Iskandar Rais. Namun, warga tetap bersikukuh untuk bertemu dengan wali kota dan menolak berdiskusi dengan perwakilan wali kota.

Arif Budiman mengatakan, pada dasarnya warga tidak banyak menuntut. Mereka hanya ingin titik pembangunan UPS dipindahkan ke lokasi yang jauh dari permukiman warga. Alasannya, mereka tidak ingin lingkungan tempat tinggal tercemar karena produksi sampah. Belum lagi adanya ancaman penyakit pembawa lain yang diakibatkan oleh tumpukan sampah. "Kami menolak pembangunan UPS. Karena kami khawatir terserang penyakit. Belum lagi suara mesinnya yang mengganggu warga," ujar Arif.

Dikatakan Arif, walikota telah melanggar hasil rapat putusan sela yang dikeluarkan DPRD pada November 2008 lalu. Dalam keputusan tersebut telah disepakati bahwa untuk sementara pembangunan dihentikan hingga ada keputusan selanjutnya. Namun, ungkap Arif, hingga saat ini pembangunan masih tetap berjalan. "Ini jelas menyalahi kesepakatan yang telah dikeluarkan DPRD," ujarnya.